



Nihil SPPG di Kota Jogja Kantongi SLHS

Pembuatan Dipercepat lewat JJS, Akan Terbit Delapan Hari

JOGJA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Jogja yang resmi beroperasi mencapai 18. Namun seluruhnya, belum ada yang mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS).

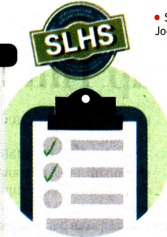
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja Lana Unwanah mengatakan, belum adanya kepemilikan SLHS pada SPPG karena pada awalnya tersebut belum menjadi persyaratan. Namun seiring waktu berjalan, Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan kepemilikan SLHS agar proses pengolahan pangan bisa memenuhi standar.

Sehingga, dia pun berharap agar SPPG yang sudah beroperasi segera melengkapi persyaratan untuk sertifikasi SLHS. Sementara bagi calon SPPG yang belum beroperasi agar mengurus dan melengkapi persyaratan sertifikasi SLHS

JAMIN HIGIENIS

PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH SPPG

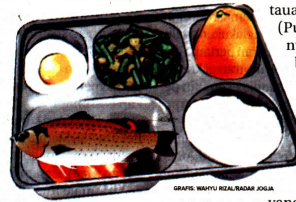
- Nomor induk berusaha dari Online Single Submission (OSS).
- Surat penunjukan penanggung jawab, dan sertifikat pelatihan hygiene sanitasi atau kearifian pangan.
- Gambar tata letak sarana produksi.
- Surat keterangan sehat seluruh karyawan.
- Pemeriksaan kualitas air parameter biologi e-coli.
- Hasil pemeriksaan sampel makanan seperti nasi dan sayur.
- Parameter kimia seperti formalin, boraks, rhodamin B dan methanil yellow.



• SPPG di Kota Jogja yang resmi beroperasi mencapai **18**

• Saat ini ada **24** SPPG yang sedang proses pembangunan.

• Kota Jogja ditarget memiliki **42** SPPG



hasil pemeriksaan sampel makanan seperti nasi dan sayur. Serta parameter kimia seperti formalin, boraks, rhodamin B dan methanil yellow.

Menurut Lana, jika persyaratan sudah dipenuhi oleh SPPG, pelayanan SLHS di Kota Jogja maksimal memakan waktu delapan hari kerja. Dia juga memasti-

kan pengurusan SLHS bebas biaya. "Jika memenuhi syarat SLHS diterbitkan. Jika belum memenuhi syarat dilakukan tindak lanjut perbaikan dulu sebelum SLHS diterbitkan," jelasnya. Sebelumnya, Deputi Bidang Peman-tauan dan Pengawasan BGN, Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha me-nyampaikan, kepemilikan SLHS bagi SPPG penting untuk meng-antisipasi adanya kasus keracunan.

Namun dia mengimbau, proses pemberbitan SLHS bagi SPPG juga harus sesuai dengan pro-sedur yang berlaku. Yakni wajib berpegang standar higienis yang benar. Meliputi operasional dapur yang harus memenuhi standar. Ter-masuk adanya instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

"Saya meminta kepada dinas kesehatan tolong jangan gampang-gampang untuk mengeluarkan SLHS. Karena ada pro-sedur yang harus dilalui," tegasnya saat melakukan pertemuan dengan Pemkot Jogja beberapa waktu lalu. **(nu/eno/zi)**

sebelum operasional dimulai.

Mengingat saat ini ada 24 SPPG yang sedang proses pembangunan. Karena Kota Jogja ditarget memiliki 42 SPPG. "Beberapa SPPG dalam proses meleng-kapi persyaratan untuk bisa diterbitkan SLHS," ujar Lana saat dikonfirmasi lewat pesan singkat kemarin (11/11).

Lana mengaku, Pemkot Jogja sudah mempermudah pengurusan SLHS ba-gi SPPG. Salah satunya melalui aplika-

si Jogja Smart Service (JSS). Pemohon tinggal melampirkan beberapa per-syaratan. Seperti nomor induk beru-saha dari Online Single Submission (OSS), surat penunjukan penanggun-jawab, dan sertifikat pelatihan hygiene sanitasi atau keamanan pangan, serta gambar tata letak sarana produksi.

Kemudian juga surat keterangan se-hat seluruh karyawan. Pemeriksaan kualitas air parameter biologi e-coli,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005